

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Kota Cimahi merupakan kota **Non-IHK (Indeks Harga Konsumen)**, sehingga inflasi tidak dihitung secara mandiri, melainkan menggunakan **Indeks Perkembangan Harga (IPH)** sebagai indikator utama. IPH dihitung oleh **BPS RI** berdasarkan data dari **Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP)**.

### **Perkembangan IPH Tahun 2025**

Kenaikan IPH tertinggi terjadi pada minggu ketiga September, mencapai 1,73% dipicu kenaikan harga ayam ras setelah mengalami penurunan yang cukup banyak di minggu ke 4 Agustus.

Komoditas penyumbang IPH tertinggi meliputi daging ayam ras, telur ayam ras, dan cabai rawit.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.

Beberapa permasalahan utama yang dihadapi dalam pengendalian inflasi di Kota Cimahi sepanjang tahun 2025 meliputi:

1. **Fluktuasi harga beberapa komoditas pokok** – Terutama pada **beras premium, minyak goreng, gula pasir, dan cabai rawit merah**, yang masih sering berada di atas HET.
2. **Ketergantungan terhadap daerah produsen** – Kota Cimahi tidak memiliki produksi pangan yang cukup, sehingga sangat bergantung pada pasokan dari daerah lain.
3. **Gangguan distribusi dan biaya logistik** – Keterlambatan distribusi menyebabkan stok berkurang, yang berdampak pada kenaikan harga di pasar.
4. **Spekulasi harga oleh pedagang** – Beberapa pedagang menaikkan harga sebelum permintaan meningkat, terutama menjelang hari besar
5. **Kurangnya kesadaran masyarakat dalam ketahanan pangan lokal** – Upaya Gerakan Menanam masih perlu diperluas agar lebih banyak masyarakat yang berpartisipasi.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah. Untuk menekan inflasi dan menjaga kestabilan harga, TPID Kota Cimahi menerapkan strategi **4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, dan Komunikasi Efektif)**, melalui berbagai program berikut:

1. **Gerakan Pangan Murah (GPM)**. GPM dilaksanakan untuk menstabilkan harga bahan pokok, antara lain:
2. GPM PANGSI (24 Juli 2025) di Kelurahan Pasirkaliki, Cimahi Utara
3. GPM SIBESTI (31 Juli 2025) 15 kelurahan
4. GPM PANGSI (7 Agustus 2025) di Selasar Gedung B Pemkot Cimahi

GPM PANGSI (12 Agustus 2025) di Kantor Kejaksaan Negeri Cimahi

- 5.
6. GPM PANGSI (14 Agustus 2025) di Selasar Gedung B Pemkot Cimahi
7. GPM SIBESTI (28 Agustus 2025) 15 kelurahan
8. GPM PANGSI (3, 4, 5 September 2025) di Kantor Polres Cimahi
9. GPM PANGSI (20 Agustus 2025) di Kantor Polres Cimahi
10. GPM PANGSI (18 September 2025) di Lapang Green Garden Melong, Cimahi Selatan
11. GPM PANGSI ( 24 September 2025) di Selasar Gedung B Pemkot Cimahi
12. GPM SIBESTI (24 September 2025) 15 kelurahan
13. GPM SERENTAK NASIONAL (30 September 2025) di Kantor Kecamatan Cimahi Utara, Kantor Kecamatan Cimahi Selatan, dan Kantor Kecamatan Cimahi Utara
14. **Pemantauan**
15. Pemantauan dan Evaluasi ketersediaan beras SPHP di Gudang Bulog Kancab Bandung (21 Agustus 2024)
16. Pemantauan Stok dan Harga Bahan Pokok Penting pada toko dan pasar rakyat Kota Cimahi :
17. Pasar Cimindi (9 Juli 2025)
18. Yogya Plaza dan Superindo (13 Agustus 2025)
19. Pasar Atas Baru (14 Agustus 2025)
20. Indomaret-Alfamaret (12 September 2025)
21. Borma Gempol (17 September 2025)
22. Trans Mall Kota Cimahi (18 September 2025)
23. Borma Rancabelut (18 September 2025)
24. Pasar Cimindi (23 September 2025)
25. Pemantauan Ketersediaan Pangan Strategis di Pasar Antri Baru (26 Agustus 2025), Pasar Cimindi (11 Agustus 2025)
26. Gerakan Serentak Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman pada Hama Tikus di Pesawahan Blok Anggaraja Kelurahan Cipageran Kecamatan Cimahi Utara (11 Agustus 2025)
27. Monitoring Penyaluran Bantuan Beras BP CPP (Beras Bantuan Pangan Pemerintah), bulan Agustus 2025

## 1. **Pembinaan Pedagang**

Pembinaan Pengelola dan Pedagang Pasar Rakyat Kota Cimahi (15 Juli 2025)

### 1. **Gerakan Menanam untuk Stabilisasi Harga Pangan**

**Pencanangan Gerakan Tanam dan Jaga Buah di Kota Cimahi** untuk Kesehatan dan ketahanan pangan keluarga.

**Pelaksanaan Gerakan Menanam (Gertam Party)** di berbagai lokasi, termasuk **Kelurahan Cipageran, Kelurahan Baros, dan Pekarangan Pangan Lestari (PPL)**.

**Pendampingan kelompok tani dan penyuluhan pertanian** guna meningkatkan hasil panen cabai dan sayuran lokal.

### 1. **Pemberian Bantuan Transportasi dari APBD**

Bantuan subsidi diberikan dalam kegiatan **GPM SiBESTI**, melalui APBD Kota Cimahi Tahun 2025 sebesar Rp 45.831.000,- untuk membantu distribusi beras ke 15 kelurahan.

1. Penyusunan Regulasi

- Penyusunan Peraturan Wali Kota Cimahi Nomor 11 Tahun 2025 tentang Upaya Penyelamatan Pangan untuk Pencegahan Food Waste
- Penyusunan Surat Edaran Wali Kota Cimahi Nomor 28 Tahun 2025 tentang Optimalisasi Pengendalian Inflasi di Kota Cimahi

4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Hasil evaluasi dari berbagai kebijakan yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 adalah sebagai berikut:

**GPM PANGSI dan GPM SiBESTI terbukti efektif dalam menstabilkan harga bahan pangan.**

**Gerakan Menanam mulai menunjukkan hasil positif** – Beberapa kelompok tani berhasil meningkatkan produksi cabai dan sayuran, meskipun masih perlu diperluas.

**Masih ada spekulasi harga oleh pedagang** – Meskipun pengawasan ketat dilakukan, masih ada pedagang yang menaikkan harga secara tidak wajar.

5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

1. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Untuk meningkatkan efektivitas pengendalian inflasi di Kota Cimahi, beberapa langkah yang direkomendasikan adalah:

**Memperluas cakupan GPM** agar lebih banyak masyarakat mendapatkan manfaat.

**Memperkuat kerja sama dengan daerah penghasil bahan pangan** guna memastikan pasokan tetap stabil.

**Meningkatkan Gerakan Menanam di skala rumah tangga** guna mengurangi ketergantungan pada pasokan luar daerah.

**Mengoptimalkan teknologi pemantauan harga** agar kenaikan harga yang tidak wajar dapat terdeteksi lebih cepat.

**Meningkatkan pengawasan dan sidak pasar** untuk mengurangi praktik spekulasi harga oleh pedagang.

Memanfaatkan keberadaan Koperasi Merah Putih sebagai outlet penyaluran bahan pangan ke Masyarakat.

Meningkatkan bantuan subsidi pemerintah untuk GPM PANGSI agar harga beras dapat seragam dengan harga beras GPM SIBESTI.